

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemajuan ekonomi suatu negara diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan indikator kesejahteraan masyarakat lainnya salah satunya adalah kemiskinan. Menurut Todaro Kemiskinan adalah kondisi dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup seperti makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan kemiskinan mencerminkan keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang untuk hidup layak (Haidir, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dimanfaatkan dengan baik mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi makro tidak selalu sejalan dengan penurunan kemiskinan karena kemiskinan merupakan permasalahan yang melibatkan aspek Pendidikan, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan (Haidir, 2023).

Menurut Sinurat (2023), kemiskinan di Indonesia juga erat kaitannya dengan rendahnya indeks Pembangunan manusia (IPM), tingginya pengangguran, dan tekanan demografis seperti jumlah penduduk yang belum sebanding dengan kesempatan bekerja. Di Indonesia upaya pengurangan kemiskinan telah menunjukkan hasil namun belum optimal persentase kemiskinan turun dari 10,12% tahun 2017 menjadi 9,57% tahun 2022, jumlah penduduk miskin masih berada di kisaran 26 juta jiwa (BPS)

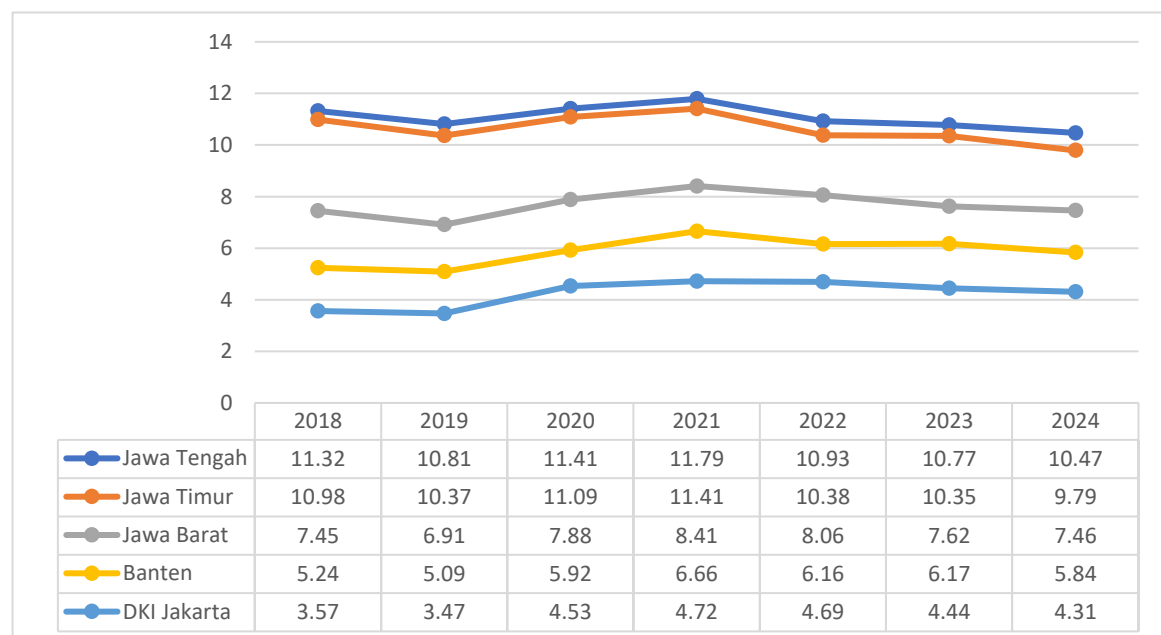
Di Indonesia kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat penting. Karena efeknya tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi, tapi juga melibatkan aspek aspek sosial, industri, dan politik di dalam negeri (Suwandi, 2011). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan fokus utama dalam upaya adalah pembangunan ekonomi, baik dalam jangka waktu Panjang ataupun pendek, serta berlaku pada peningkatan nasional maupun regional.

Salah satu kawasan dengan beban kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah pulau Jawa meskipun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, industri, dan perdagangan nasional

permasalahan kemiskinan masih menjadi topik yang banyak di bicarakan. Di pulau jawa menampung setengah populasi penduduk di Indonesia. Artinya secara persentase penduduk miskin menurun namun jumlah absolut atau total individu yang hidup di bawah garis kemiskinan tetap besar (BPS, 2023).

Provinsi Jawa Tengah telah menghadapi permasalahan yang cukup strategis dalam menghadapi permasalahan mulai dari pihak masyarakat maupun pemerintahan (Wahyudi & Rejekingsih, 2013). Permasalahan ini juga menjadi fokus utama dalam konteks pembangunan otonomi daerah provinsi Jawa Tengah, sehingga penanganan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah juga masih perlu di berikan perhatian yang cukup.

Ragam kebijakan dan strategi untuk mengatasi kemiskinan, baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung, hal tersebut telah di implementasikan baik secara nasional maupun lokal meskipun pembangunan telah di laksanakan namun berhadil mengurangi jumlah penduduk miskin yang terus meningkat (Rusdarti & Sebayang, 2013)



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2024 (Persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2025

Gambar 1.1 Menunjukkan bahwasanya presentase penduduk miskin daerah Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 yang mengalami fluktuasi yang bisa di katakana jauh dari rata – rata kemiskinan dengan beberapa provinsi lainnya. Jawa

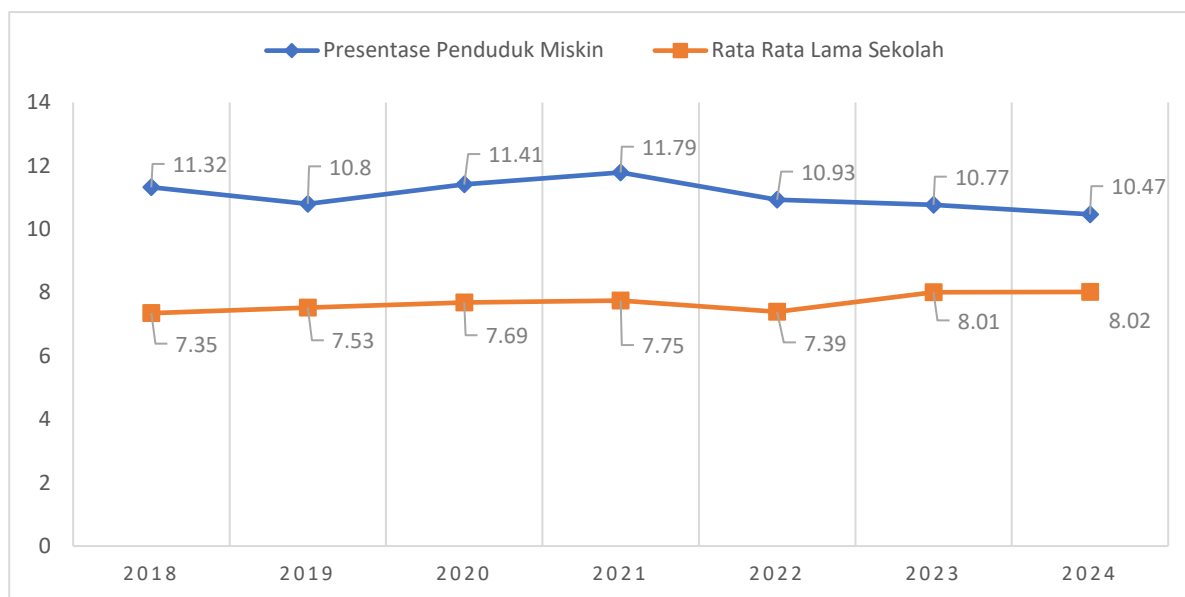
Tengah memiliki rata rata tingkat kemiskinan sebesar 11,07% pada periode 2018-2024. Pemerintah melalui upaya pembangunan nasional untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sesuai dengan hal itu, berbagai proyek pembangunan telah di tekankan pada pengembangan daerah, khususnya wilayah yang relative mempunyai tingkat kemiskinan yang meningkat dari tahun ke tahun (Sari, A. K., 2013).

Provinsi Jawa Tengah dalam penelitian ini dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan pembanding tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh provinsi tersebut berada dalam satu kawasan geografis yang memiliki karakteristik pembangunan ekonomi, kepadatan penduduk, serta struktur perekonomian yang relatif sebanding. Dengan demikian, perbedaan tingkat kemiskinan yang terjadi dapat dianalisis secara lebih relevan karena berada pada lingkungan regional yang serupa.

Selain itu, Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, namun masih menyimpan kesenjangan tingkat kemiskinan antardaerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Pulau Jawa selama periode 2018–2024. Oleh karena itu, perbandingan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa lebih tepat untuk menunjukkan posisi Jawa Tengah dibandingkan wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan demografi yang berbeda, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, maupun Papua.

Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi suatu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, pertumbuhan yang tidak terkenadali mampu menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, antara lain kesejahteraan masyarakat, dan dapat meningkatkan angka kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016).

Pendidikan memiliki peran penting dalam menghadapi tingkat kemiskinan di seluruh negara dalam jangka panjang. (Usman & Diramita, 2018) Menyatakan bahwa kebijakan yang mempromosikan kehadiran sekolah yang lebih lama, dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan bahwa kesempatan pendidikan juga tersedia untuk semua anggota masyarakat. Yang bertujuan untuk menciptakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang di butuhkan (Lincoln, 2019).

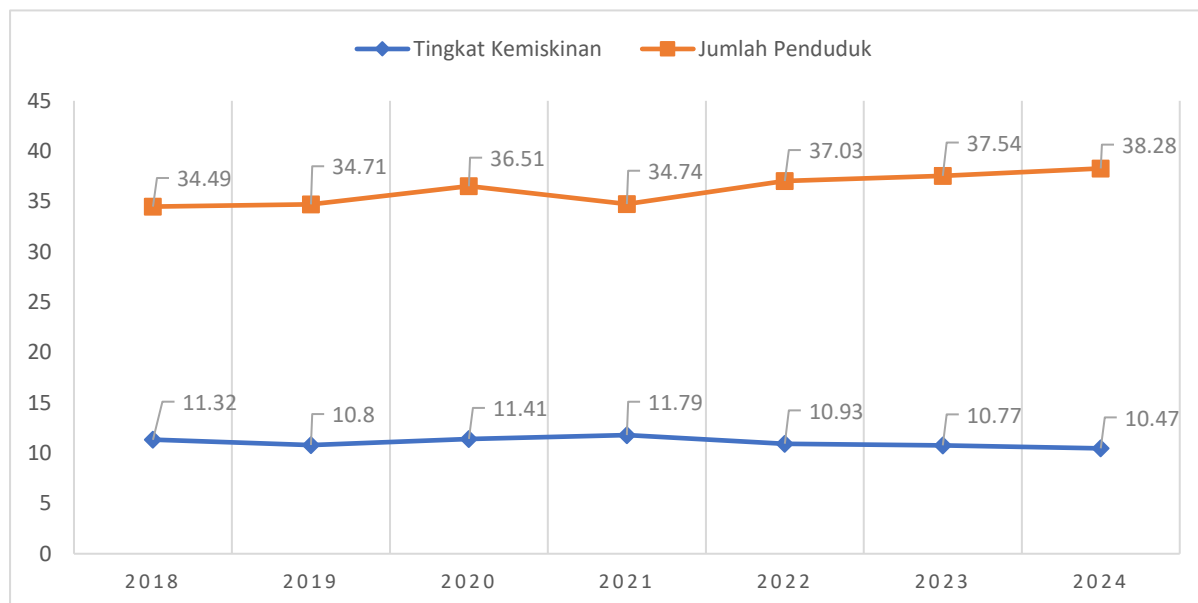


Gambar 1. 2 Rata rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2024 (Tahun)
Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2025

Gambar 1.2 Menunjukkan bahwa rata- rata durasi masa pendidikan di Provinsi Jawa Tengah cukup membaik dengan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun Di Jawa Tengah presentase Rata Rata Lama Sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 7,35 lalu naik lagi di tahun 2024 menjadi 7,69 hingga di tahun 2024 menyentuh angka 8,02. Meskipun Angka rata – rata pendidikan lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, tidak jauh berbeda jika di bandingkan dengan beberapa provinsi yang lain. Pendidikan yang memadai di harapkan supaya penduduk miskin dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Menurut Hamalik dalam (Mulyadi & Nursikin, 2025), pendidikan di anggap sebagai syarat yang di perlukan untuk mencapai sebuah pembangunan daerah, semakin tinggi tingkat pendidikan produktivitas seseorang cenderung meningkat, yang nantinya akan berdampak baik terhadap peningkatan penghasilan atau upah minimum

kerja (UPK). Oleh karena itu, korelasi antara tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan di anggap bersifat negative.

Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi suatu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, pertumbuhan yang tidak terkenadali mampu menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, antara lain kesejahteraan masyarakat, dan dapat meningkatkan angka kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016).



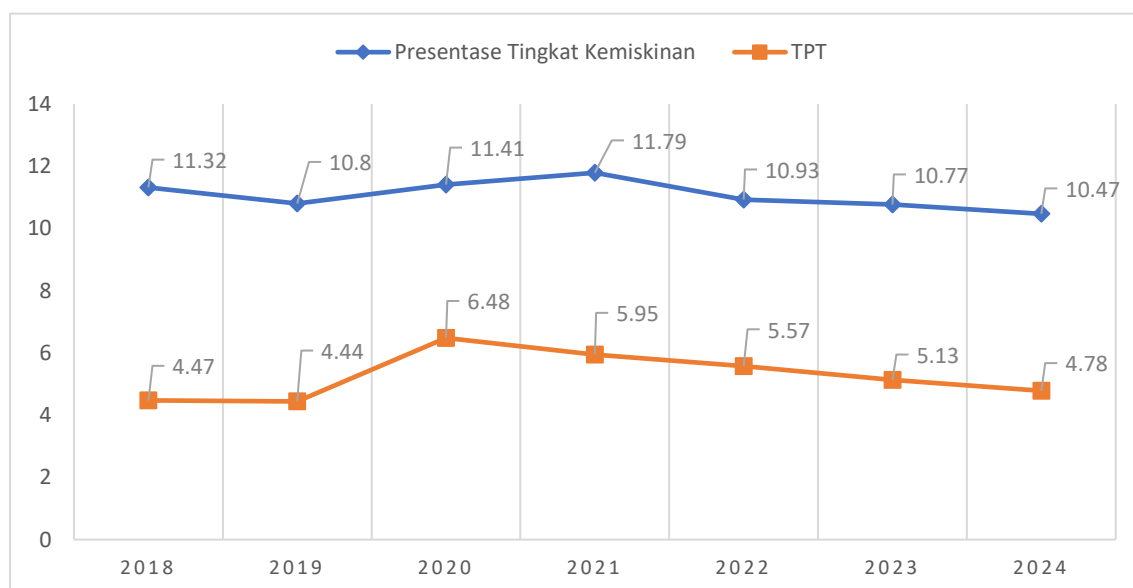
Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2024 (Jiwa)
Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2025

Gambar 1.3 Di atas menunjukkan bahwa angka dari jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di tahun 2018 adalah 34,49 naik lagi menjadi 37,03 di tahun 2022 dan naik lagi di tahun 2024 menjadi 38,28, akan tetapi masih jauh di bawah provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang jumlah penduduknya memiliki angka lebih besar di dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah. Ketika di suatu daerah terjadi peningkatan jumlah penduduk, hal itu dampak berdampak terhadap aspek perekonomian di suatu daerah, terutama pada kategori kemiskinan yang dapat mengalami peningkatan atau bisa jadi angka penurunan (Wahidah & Saleh, 2024). Peningkatan jumlah penduduk sendiri dapat mendorong pertumbuhan dalam jumlah tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi, akan tetapi jika masyarakat tidak mampu mengatasi dampak nya, hal

tersebutlah yang mampu mempengaruhi peningkatan kemiskinan yang mungkin saja akan meningkat (Zulhanafi, Hasdi Aimon, 2013).

Pengangguran juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya tentang populasi jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan. Tingkat Kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, hal tersebut terjadi karena banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat terserap secara baik pada lapisan pendidikan rendah dan tinggi (Sanjaya, 2013).

Permasalahan pengangguran di setiap daerah bahkan di dunia menjadi tantangan tersendiri yang sulit di hadapi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang terjadi, seperti kemampuan individu, akses informasi, dan faktor lain (Putri et al., 2024). Orang yang mengalami pengangguran umumnya tersebar baik di wilayah pedesaan ataupun perkotaan. Pengangguran yang terjadi di pedesaan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, sehingga sulit untuk bersaing di dunia kerja, sementara itu pengangguran di perkotaan banyak dialami oleh lulusan – lulusan terdidik karena ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan keterampilan dan kesiapan agar mampu menghadapi persaingan (Rudi Susanto, 2019).



Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2024 (Jiwa)
Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2025

Gambar 1.4 Menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah mengalami Fluktuasi namun relative menurun di tahun 2018 sebesar 11,32 mengalami penurunan di tahun berikutnya yaitu 10,8 di tahun 2019 lalu mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 sebesar 11,79 lalu di tahun 2024 cenderung menurun menjadi 10,47. Provinsi Jawa Tengah dapat di bilang baik di bandingkan dengan beberapa Provinsi lain yang jauh lebih besar angka penganggurannya. Tingkat kemiskinan juga berasal dari tingkat pengangguran yang tinggi. Menurut (Sukirno, 2006) dampak buruk dari pengangguran termasuk penurunan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kesuksesan ekonomi individu, maka turunnya kesejahteraan akibat pengangguran dapat meningkatkan Risiko orang yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Suatu permasalahan pengangguran dapat muncul karena pertumbuhan angkatan kerja yang cepat tapi pertumbuhan lapangan kerja yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan rendahnya keberhasilan pembangunan suatu negara sehingga pengangguran memiliki potensi untuk memperburuk tingkat kemiskinan melalui berbagai mekanisme (Tambunan, 2013).

Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan merupakan hal yang paling penting. Jika masyarakat tidak menganggura maka masyarakat telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan. Dengan penghasilan yang dimiliki maka diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka tidak akan ada masyarakat miskin. Tingkat pengangguran yang rendah dengan kesempatan kerja yang ada tinggi, maka tingkat kemiskinan akan menjadi rendah.

Berdasarkan variabel di atas, pendidikan, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran dipilih sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena ketiga variabel tersebut merupakan faktor yang secara teoritis maupun empiris memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Jumlah penduduk mencerminkan tekanan demografis yang dapat memengaruhi penyediaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, serta kebutuhan pelayanan publik. Sementara itu, tingkat pengangguran menunjukkan kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja, di mana tingginya pengangguran dapat menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada ketiga variabel tersebut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2024.

Melihat dari angka pendidikan, jumlah penduduk, dan pengangguran yang terlihat cukup baik, akan tetapi kecenderungan penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah masih terus mengalami angka kemiskinan lebih tinggi dari beberapa provinsi lainnya, dalam rentang waktu 2018 – 2024. Berdasarkan pada latar belakang ini dan mempertimbangkan masalah yang telah di uraikan maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupateb/Kota Provinsi Jawa Tengah”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2024 ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemsikinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2024 ?
3. Bagaiamana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2024 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat di ketahui tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2024 ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2024 ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2024 ?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di sebutkan di atas, di harapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau nilai tambah. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini mencakup :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, di harapkan hasil penelitan ini di dapat memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Ekonomi, terutama dalam konteks Ekonomi Pembangunan terkait dengan masalah kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang akan meelakukan penelitian serupa atau mengembangkan variabel – variabel yang telah di teliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah mengetahui pengaruh pendidikan, jumlah pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemsikinan, di harapkan dapat menggunakan pengethauna tersebut sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan yang lebih aktif, Tujuannya adalah

supaya implementasi kebijakan dapat di optimalkan dan sejalan dengan upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang gunanya sebagai sumber informasi yang berharga bagi para mahasiswa teriakit isu kemiskinan yang terus meningkat, di pengaruhi oleh faktor pendidikam, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pendidikan, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran.